

No. Daftar FPEB: 231/UN40.A7.D1/PI/2019

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2008-2017)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menempuh Ujian Sidang
Sarjana Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Akuntansi



Disusun oleh

M. RIZKI

NIM. 1505940

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

2019

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2008-2017)**

Oleh
M. Rizki

Skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis

© M. Rizki 2019
Universitas Pendidikan Indonesia
Agustus 2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian,
dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa izin dari penulis.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2008-2017)**

Oleh:

M. Rizki

NIM. 1505940

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Nugraha, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIP 196612261990011002

Pembimbing II



Arvian Triantoro, S.Pd, M.Si.
NIP 198011122005011002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Pendidikan Akuntansi



Dr. H. Nugraha, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIP 196612261990011002

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2008-2017)**

M. Rizki

**Pembimbing: Dr. H. Nugraha, S.E., M.Si., Akt., CA., CTA/
Arvian Triantoro, S.Pd., M.Si.**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang jika dilihat dari rasio kemandirian, ketergantungan, derajat desentralisasi fiskal, efektivitas, efisiensi, dan aktivitas Keuangan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi, deskriptif dan kuantitatif. Selain itu, data yang dianalisis dalam penelitian ini diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dilihat dari Rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pola hubungan instruktif. Rasio ketergantungan daerah memasuki kriteria sangat tinggi ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio derajat desentralisasi fiskal memasuki kriteria sangat kurang dalam hal desentralisasi fiskal. Rasio efektivitas memasuki kriteria sangat efektif dalam hal efektivitas PAD. Rasio efisiensi memasuki kriteria kurang efisien. Rasio aktivitas menjelaskan bahwa belanja daerah didominasi oleh belanja rutin daripada belanja pembangunan.

Kata kunci: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas.

**ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE
(Study in The 2008-2017 Pandeglang Banten District)**

M. Rizki

**Mentor: Dr. H. Nugraha, S.E., M.Si., Akt., CA., CTA/
Arvian Triantoro, S.Pd., M.Si.**

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the Financial Performance of Pandeglang District Government to see the ratio of independence, dependency, the degree of tax decentralization, effectiveness, efficiency, and Regional Finance activities. This research is a quantitative study, with the research methods used are documentation, descriptive and quantitative methods. Besides the data analyzed in this study are from the Realization of Local Revenue and Expenditure Budget Reports. The financial performance of the regional government of Pandeglang Regency is seen from the ratio of regional financial independence having an instructive relationship pattern. The regional dependency ratio enters the very high criteria of regional government financial dependence on the central government. The ratio of the degree of fiscal decentralization into the criteria is very less in terms of fiscal decentralization. The effectiveness ratio entering the criteria is very effective in terms of the effectiveness of PAD. The efficiency ratio enters the less efficient criteria. The activity ratio explains that regional expenditure is dominated by routine expenditure rather than development expenditure.

Keywords: regional financial independence ratio, regional financial dependency ratio, fiscal decentralization of the degree ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, and activity ratio.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah Penelitian	8
C. Rumusan Masalah Penelitian	11
D. Maksud dan Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	13
B. Teori Anggaran Publik	14
C. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)	20
D. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	22
E. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	25
F. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	28
G. Hasil Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Desain Penelitian	42

B.	Operasionalisasi Variabel.....	43
C.	Sumber Data Penelitian.....	44
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	45
E.	Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		53
A.	Gambaran Obyek Penelitian.....	53
B.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	56
C.	Analisis Data.....	76
D.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	103
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		114
A.	Simpulan.....	114
B.	Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....		117
LAMPIRAN.....		123

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten di Pulau Jawa Tahun 2017.....	2
Tabel 1. 2 Ketergantungan Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten di Pulau Jawa Tahun 2017.....	3
Tabel 1. 3 Desentralisasi Fiskal Seluruh Kabupaten di Pulau Jawa Tahun 2017 ..	4
Tabel 1. 4 Efektivitas Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten di Pulau Jawa Tahun 2017.....	4
Tabel 1. 5 Efisiensi Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten di Pulau Jawa Tahun 2017.....	5
Tabel 1. 6 Aktivitas Pembangunan Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten di Pulau Jawa Tahun 2017.....	5
Tabel 1. 7. Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2017.....	7
Tabel 2. 1. Sistem Penganggaran Publik.....	18
Tabel 2. 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	29
Tabel 2. 3. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah	31
Tabel 2. 4. Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	32
Tabel 2. 5. Kriteria Kinerja Efektivitas Keuangan.....	32
Tabel 2. 6. Kriteria Kinerja Efisiensi Keuangan	33
Tabel 2. 7. Skala Interval Rasio Belanja Pembangunan	34
Tabel 2. 8. Hasil Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel	43
Tabel 3. 2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	46
Tabel 3. 3 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah	47
Tabel 3. 4 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	48
Tabel 3. 5 Kriteria Kinerja Efektivitas Keuangan.....	49
Tabel 3. 6 Kriteria Kinerja Efisiensi Keuangan	49
Tabel 3. 7 Skala Interval Rasio Belanja Pembangunan	50
Tabel 4. 1 Penduduk Kabupaten Pandeglang	54

Tabel 4. 2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017	60
Tabel 4. 3 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017	63
Tabel 4. 4 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017.....	66
Tabel 4. 5 Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017	68
Tabel 4. 6 Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017	71
Tabel 4. 7 Tabel Rasio Aktivitas Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017.....	74
Tabel 4. 8 Rasio Aktivitas Belanja Rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Diagram Pendapatan Kabupaten Pandeglang Rata-Rata Tahun 2008-2017.....	57
Gambar 4. 2 Diagram Belanja Kabupaten Pandeglang Rata-Rata Tahun 2008-2017.....	58
Gambar 4. 3 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017	77
Gambar 4. 4 Grafik Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017.....	78
Gambar 4. 5 Grafik Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017.....	79
Gambar 4. 6 Grafik Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017.....	81
Gambar 4. 7 Grafik Pendapatan Transfer Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017.....	82
Gambar 4. 8 Grafik Total Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017	83
Gambar 4. 9 Grafik Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017	85
Gambar 4. 10 Grafik Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017	86
Gambar 4. 11 Grafik Total Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017	87
Gambar 4. 12 Grafik Rasio Efektivitas Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017	89
Gambar 4. 13 Grafik Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017	90
Gambar 4. 14 Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017	91
Gambar 4. 15 Grafik Rasio Efisiensi Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017. 93	

Gambar 4. 16 Grafik Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017	94
Gambar 4. 17 Grafik Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017	95
Gambar 4. 18 Grafik Rasio Aktivitas Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017	97
Gambar 4. 19 Grafik Belanja Pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017.....	98
Gambar 4. 20 Grafik Belanja APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017 .	99
Gambar 4. 21 Grafik Belanja Rutin Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017.	101

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah:

- Adhiantoko, H. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011). Skripsi. Yogyakarta: Program Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ali, M. dan Asrori, M. (2014). Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL–UGM. (1991). Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2009-2017. Banten: Badan Pusat Statistik.
- Bappeda Kabupaten Pandeglang. (2016). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Pandeglang : Bappeda.
- Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Bisma, Gede, I.D, dan Susanto, H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007 , Ganec Swara Edisi Khusus, Vol. 4, No. 3, Desember 2010.
- Bryman, A. (2012). Social Research Methods. 4th ed. United States: Oxford University Press Inc. 418.
- Cahyadi, M.I. (2012). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Skripsi. Pekanbaru: Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Cooper, D.R, dan Schindler, P.S. (2014). Business Research Methods. New York: McGraw-Hill.
- Dharmastuti, C.F, and Gousario, F. (2015). Regional Financial Performance And Human Development Index Based On Study In 20 Counties/Citiesof Level I

Region. *Manajemen Review . Journal The Winners* , Vol. 16 No. 2, September 2015: 152-165.

Dora, J. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2014. Skripsi. Yogyakarta: Program Sarjana Universitas Sanata Dharma.

Eisenhardt, K. (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of Management Review*.

Elmi, B. (2007) *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: UI-Pres.

Gitusudarmo, I.A. dan Basri. (2002). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.

Governmental Accounting Standards Boards (GASB). (1999). Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting in Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government. Norwalk.

Hakim, M.F. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintahdaerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016. Skripsi. Yogyakarta: Program Sarjana Universitas Islam Indonesia.

Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP–AMP YKPN.

Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat .

Harahap. S.S. (2007). *Anilisa Kritis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Haryanto, J.T. (2016). Comparative Analysis of Financial Performance in Fiscal Decentralization Era Among Natural and Non-Natural Resources Region. *Jurnal Bina Praja* 9 (2) (2017): 171 – 184.

Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan iKuantitatif*, Jakarta: Erlangga.

Indriantoro, N, dan Bambang S. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Jensen, M.C, and Meckling, W.H, (1976). They of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure, *Jurnal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, October pp. 305-360.

Kamaroellah R.A., (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Ekonomi dan bisnis Islam*, Vol. 14 No. 1.

- Kartika D., dan Kusuma I.C. (2015). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Pad, Dan Rasio Efisiensi Pad Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Sukabumi. AKUNIDA ISSN 2442-3033.
- Kementerian Keuangan. (2019). Laporan APBD Kementrian Keuangan. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Lazyra K. (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. Medan: Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2012). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2003). Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Maryati. (2010). Statistika Ekonomi dan Bisnis, Edisi Revisi Cetakan Kedua Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN
- Muryanti K. (2017). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015. Juli : Surakarta.
- Musgrave, R.A, and Musgrave, P. (1984). Public Finance in Theory and Practice. New York: McGraw-Hill Inc.
- Mutiha, A.H. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014. Volume 4 Nomor 2, pp 105-121.
- Nurchayono dan David. (2008). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan Era Otonomi Daerah (Periode 2001-2006). Surabaya : Program Sarjana. Universitas Airlangga.
- Nurdiwaty D dan Zaman B. (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Di Kota Kediri. Ekonomika-Bisnis. p-ISSN : 2088-6845 e-ISSN : 2442-8604.
- Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol.4 No.1 Januari 2015.
- Pramita, P.R. (2015). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013. Skripsi. Yogyakarta: Program Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pricilia Z.A. (2018). Analisis Faktor Kinerja Keuangan Daerah Diukur Dengan Kemandirian, Efektivitas, Dan Efisiensi. Agustus. Kediri.

- Rahayu, K.E.M. (2014). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008 – 2012. Surakarta: Naskah Publikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Januari.
- Sekaran, U. (2006). Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2014). Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Research Methods for Business). Buku 1 Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Sistiana, M, Supranoto, dan Makmur M.H. (2012). Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota Diprovinsi Jawa Timur Tahun 2006-2010. Jawa Timur.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Suoth, N, Tinangon J, dan Rondonuwu, S. (2016). Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (Dpkpa) Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Hal. 613-622.
- Supriyadi, Armandelis, dan Rahmadi, S. (2013). Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1. ISSN: 2338- 4603.
- Sutriani, A. (2015). Analisis Kemandirian Dan Ketergantungan Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun. Sarolangun.
- Syamsi, I. (1986). Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional. Jakarta: CV. Rajawali.
- Syamsi, I. (1987). Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara,. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Wahab L.O.A, Rofingatun, dan Kreuta B., (2016) Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. Jurnal Keuda Vol. 2 No. 3 ISSN 2477-7838.
- Widodo. (2001). Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cedekia.
- Wulandari, A. (2001). Kemampuan Keuangan Daerah. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol 5 No 2 November.
- Wulaningrum, R (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Makalah Politeknik Negeri Samarinda. Samarinda.

Zuhri, M., dan Soleh, A (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Ekombis Review. Juli. Bengkulu.

Zuldafrial. (2012). Penelitian Kualitatif. Surakarta: Yuma Pustaka.

Peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya:

FPEB. (2014). Pedoman Operasional Penulisan Skripsi. Bandung: Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.

Kepmendagri No 29 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan, Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah, .Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kepmendagri, 2008, Undang-Undang Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nommor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaah keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.